

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pola baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas-transparansi. Yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 68 dan 69 menyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Rumah Sakit adalah suatu unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan jasa pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pengelolaan unit usaha Rumah Sakit memiliki keunikan tersendiri, karena selain sebagai unit bisnis, usaha Rumah Sakit juga memiliki misi sosial (Tinarbuka, 2011).

Rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit yang dioperasikan oleh pemerintah, otoritas lokal, dan organisasi nirlaba. Berdasarkan hukum negara republik indonesia. nomor. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan pengobatan dan rehabilitasi sesuai standar rumah sakit; (2) memelihara dan meningkatkan kesehatan individu melalui pelayanan medis tingkat kedua dan ketiga yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis; dan (3) memberikan kapasitas pendidikan sumber daya manusia dalam meningkatkan pelayanan kesehatan (4) mengatur penelitian, pengembangan, dan teknologi laboratorium di bidang kesehatan, dengan memperhatikan etika ilmu di bidang kesehatan, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah dan tidak terpisah dari pemerintah daerah. Model Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah model pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas dalam bentuk fleksibilitas untuk mengadopsi praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pekerjaan umum, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerahkan kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perilaku kerja yang baik, dan kinerja organisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di rumah sakit, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan keuangan, BLUD diberikan fleksibilitas antara lain berupa: (1) pengelolaan pendapatan dan biaya; (2) pengelolaan kas; (3) pengelolaan utang; (4) pengelolaan piutang; (5) pengadaan barang dan/atau jasa; (6) penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban (7) pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran (8) pengelolaan dana secara langsung.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Palopo sebagai unit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan surat keputusan Walikota Palopo tanggal 09 April 2012 nomor : 397/IV/2012 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD penuh, dan mulai diterapkan sejak 01 Januari 2014.

Adanya keistimewaan yang diberikan kepada BLUD dikarenakan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari BLUD. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan perwujudan dari penyusunan anggaran yang disusun oleh BLUD untuk digunakan oleh BLUD itu sendiri. Berbeda dengan unit kerja Pemerintah Daerah lainnya yang menyusun anggarannya dengan menggunakan format Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Anggaran sektor publik merupakan salah satu fungsi perencanaan, pengelolaan, dan akuntabilitas publik yang ditandai dengan penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif yang mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, penetapan tujuan, dan tingkat keterwakilan instansi pemerintah yang memiliki sumber daya. Mencapai tujuan yang telah ditentukan. Anggaran pemerintah merupakan sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang didanai publik. Pengembangan sistem anggaran publik telah menjadi alat politik multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Fungsi anggaran pemerintah itu sendiri adalah alat perencanaan, alat manajemen, alat kebijakan fiskal, alat kebijakan, alat koordinasi dan komunikasi, alat review kinerja, alat motivasi, dan alat penciptaan ruang publik. Anggaran publik bertindak sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial dan ekonomi, memastikan keberlanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak terbatas dan akan terus bertambah, sehingga anggaran diperlukan karena sumber daya yang tersedia untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya terbatas. Anggaran juga membantu pemimpin mengenali penghematan baru sehingga koreksi di masa depan dapat dilakukan dan dicegah. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo, dengan bantuan dana BLUD (Badan layanan umum daerah) maka dari itu peneliti ingin mengetahui secara empiris sejauh mana Rumah Sakit menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Sawerigading Palopo.

Seperti kita ketahui, salah satu tantangan reformasi di departemen keuangan publik adalah transisi dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan pendekatan berorientasi kinerja ini, pendanaan pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi berorientasi pada output. Sebagai tindak lanjut dari peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan pemekaran instansi daerah atau unit usaha menjadi instansi daerah di lingkungan pemerintah daerah yang ingin mengadopsi gaya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan objektif, teknis dan administratif.

Dalam kegiatan operasionalnya, rumah sakit harus siap setiap saat dengan sarana, tenaga, prasarana, maupun dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan diharap agar dapat bekerja dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat, namun di lain pihak, rumah sakit dihadapkan pada semakin langkanya sumber dana untuk membiayai kebutuhannya (Djuhaeni, 2006).

Melihat dari latar belakang diatas dan hasil penelitian yang beragam, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitiannya pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah “Bagaimanakah Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit, serta diharapkan sebagai sarana ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan menambah wawasan ilmiah tersendiri bagi peneliti, serta memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo.

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah.

c. Bagi Rumah Sakit

Hasil yang di dapatkan pada penelitian ini diharapkan memberikan saran, pemikiran serta informasi agar nantinya dapat bermanfaat untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

1.5. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Batasan masalah yang ada pada penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memberi batasan terhadap objek penelitian yang akan diangkat sehingga penulis agar tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dari lokasi penelitian dalam menentukan batasan penelitian maka penulis mengarahkan pada informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Batasan penelitian ini penulis menyesuaikan dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

Masalah dalam penelitian ini sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Batasan masalah ini diharapkan agar disetujui dari faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup permasalahan penelitian serta faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup permasalahan penelitian. Pemilihan batas masalah yang melanjutkan haruslah berdasarkan pada alasan yang tepat, baik itu alasan teori juga alasan praktis agar penelitian tersebut akurat.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi hasil penelitiannya menjadi lima bab yang dimulai dari BAB I sampai BAB V sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Adapun kerangka isi penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan permasalahan yang nantinya akan diteliti, dalam hal ini meliputi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai desain penelitian, kehadiran peneliti, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan yang terakhir analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis memaparkan gambaran umum objek penelitian yang berupa penerapan sistem pengelolaan keuangan data dan selanjutnya pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh dari metode penelitian berupa data hasil penelitian.

BABV : PENUTUP

Dalam bab ini terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang diteliti yakni Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengelolaan Keuangan

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, (PPK-BLUD) ialah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian terhadap ketentuan aturan dari pengelolaan keuangan daerah pada publik lokal.

Secara umum pengelolaan keuangan berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan mengatur keuangan yang berarti hal-hal yang berkesinambungan dengan uang atau dana antara lain; pembiayaan, investasi, modal, dan belanja. Sehingga apabila disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara pengelolaan keuangan yang dimulai dari memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana keuangan sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan Rumah Sakit (Armereo et al.:2020:1).

2.1.2. Proses Pengelolaan Keuangan

Proses pengelolaan keuangan ialah analisis keuangan merupakan fondasi atau tiang keuangan, dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini ataupun dimasa lalu, sehingga dapat dikelola untuk pengambilan

keputusan bagi para manajer perusahaan yang berkaitan dengan itu dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang mendatang (Kuswadi 2005:3). Terdapat empat kerangka dasar pengelolaan keuangan :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kuswadi (2005:6) kegiatan perencanaan pada keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Menurut Sulistyowati et al. (2020:3).

Anggaran merupakan rencana perusahaan yang komprehensif dan tertulis secara kuantitatif untuk periode waktu tertentu atau yang telah ditentukan sebelumnya. Anggaran adalah kunci sukses dalam mencapai tujuan bisnis sepenuhnya. Jenis-jenis anggaran gabungan adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran produksi
- b. Anggaran penjualan
- c. Anggaran modal
- d. Anggaran laba

Perencanaan keuangan diperlukan agar dapat menyusun kebutuhan-kebutuhan dana untuk berbagai macam pembiayaan program dan kegiatan Rumah Sakit. Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang

paling sulit dilakukan karena adanya faktor ketidakpastiaan masa yang akan datang. Perencanaan perlu dilakukan secara terus menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu menyusun dan merevisi kembali rencana sebelumnya (Sulistiyowati et al.:2020:2).

2. Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisannya secara kronologis dan sistematis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi pada periode tersebut. Contoh pencatatan dapat berupa nota, kuitansi, faktur, dan lain-lain. Selanjutnya ialah menulis transaksi dalam jurnal, lalu diposting kedalam buku besar. Sebelum memulai pencatatan perlu dipahami prinsip-prinsip dasar dari pencatatan pengelolaan keuangan :

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memposting ke buku besar, dan buku besar pembantu. Postingan dalam buku bsar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan, setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan kuangan sbagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan kuangan ada laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Menurut Kuswadi (2005:7) kegiatan dari pengendalian, salah satunya adalah pemantauan terhadap realisasi anggaran. Jenis pengendalian adalah pengendalian awal, pengendalian berjalan dan pengendalian umpan balik.

2.1.3. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Menurut Astuty (2019:1) tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh dari praktik. Disamping itu untuk mewujudkannya seorang pengelola wajib mengikuti prinsip:

- a. Konsistensi, merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan.
- b. Akuntabilitas ialah prinsip-prinsip yang harus diikuti manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban dana dalam suatu organisasi. Tujuan dari prinsip akuntabilitas ini adalah untuk memungkinkan manajer untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang perkembangan bisnis.
- c. Transparansi, prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal laporan keuangan.
- d. Kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri maka kesehatan keuangan harus terjaga. Pengeluaran di tingkat operasional atau di tingkat strategis disesuaikan dengan besaran dana yang dimiliki. Dalam pengelolaan

keuangan ini, pihak pengelola memiliki rencana yang terintegrasi dengan mengurangi risiko sekecil mungkin.

Pengelolaan keuangan tidaklah hanya untuk memaksimalkan laba melainkan untuk meminimumkan biaya hal ini dikarenakan melalui pengelolaan yang baik diharapkan mampu menekan biaya-biaya yang mungkin timbul dari operasi perusahaan (Armereo *et al.*, :2020:6). Sedangkan menurut Kariyoto (2018:6) ada beberapa tujuan dari pengelolaan dana perusahaan yaitu :

- a. Meningkatkan nilai-nilai perusahaan
- b. Mempersempit resiko perusahaaan masa kini dan yang masa yang akan datang.
- c. Menjaga stabilitas keuangan dalam situasi yang selalu terkontrol.

2.1.4. Tertib Administrasi

Pengelolaan Keuangan Hartati (2014) menyatakan mengorganisasikan administrasi sebenarnya merupakan pekerjaan yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Menata administrasi dimulai dengan memilah-milah berkas atau file kedalam kelompok permasalahan yang sama atau serupa. Manajmen tidak dapat menyiapkan perencanaan tanpa adanya data yang akurat . Kegiatan adaministarsi yang perlu dilaksanakan perusahaan :

1. Administrasi piutang

Piutang adalah kekayaan perusahaan yang di dalam laporan neracadiletakan pada sisi asset atau aktiva. Administrasi piutang merupakan catatan yang penting. Catatan yang benar dan terkini sebagai informasi internal dan eksternal. Dalam kondisi eksternal piutang dapat dijadikan agunan kepada

pemberi pinjaman untuk mengatasi keuangan jangka pendek. Manfaat bagi informasi internal adalah untuk perencanaan dan evaluasi atau pengendalian

2. Administrasi Hutang

Hutang adalah kewajiban Perusahaan kepada pihak ketiga. Dalam neraca, kreditur ditempatkan pada sisi pasif atau *liability*. Pencatatan menentukan kewajiban perusahaan sama pentingnya dengan piutang. Laporan Status Utang memperingatkan pengusaha untuk mengambil beberapa langkah-langkah proaktif.

3. Administrasi Persediaan

Persediaan merupakan kekayaan perusahaan. Dalam neraca akun persediaan diletakkan pada sisi aktiva di bawah akun piutang. Persediaan memiliki peran yang strategic baik usaha yang bergerak di bidang perdagangan maupun manufaktur. Administrasi yang dilakukan secara tepat waktu sangat membantu pemilik usaha mengambil keputusan kapan harus membeli kembali atau menjaga agar tidak kehabisan persediaan.

4. Administrasi Asset Tetap

Asset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca diletakkan pada sisi asset di bawah persediaan. Aset tetap berpotensi menjadi modal dengan catatan data tentang setiap asset yang dimiliki perusahaan tercatat dengan tertib dalam administrasi asset. Pencatatan atas asset tetap berfungsi untuk menunjukkan kapan barang tersebut dibeli kemudian digunakan untuk menentukan tingkat penyusutan dan mulai berlakunya serta waktu berakhirnya.

5. Administrasi Kas

Uang kas merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca diletakkan pada sisi asset dan ditempatkan paling atas. Jumlah kas lazimnya tidak besar dan ketersediaanya secukupnya untuk mendukung kegiatan perasional sehari-hari. Uang tunai didalam kas perlu dijaga jumlah maksimalnya yakni sebesar kebutuhan operasional. Pencatatan uang kas sangat berguna dalam memberikan informasi tentang berapa jumlah uang kas yang masuk dan yang keluar sehingga menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.

6. Administrasi Penggajian

Administrasi penggajian merupakan bagian dari manajemen personalia. Dalam system administrasi keuangan, administrasi penggajian masuk ke dalam kelompok biaya. Pencatatan tentang penggajian akan menginformasikan tentang jumlah biaya yang dibayarkan untuk upah pegawai. Administrasi penggajian juga sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Manfaat lainnya untuk menjaga keseimbangan antara perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan sehubungan dengan kinerja karyawan

7. Administrasi Lainnya

Administrasi surat masuk, surat keluar, pencatatan tentang berbagai kebijakan perusahaan, administrasi sewa-menyewa asset, kerjasama serta kegiatan langsung yang dilakukan oleh perusahaan.

2.1.5. Analisis Keuangan

Analisis membutuhkan alat khusus ketika menafsirkan dan menganalisis laporan bisnis suatu perusahaan. Metrik yang umum digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Memahami rasio sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam “*arithmetical terms*” yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua jenis laporan keuangan.

Rasio keuangan perbandingan satu pos adalah angka yang diperoleh dari hasil laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai dengan cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkan dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian. Analisis terhadap rasio-rasio tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu:

1. Rasio Likuiditas menggambarkan jumlah uang yang tersedia untuk membayar biaya-biaya jangka pendeknya. Rasio ini umumnya dipakai untuk menilai kinerja keuangan pada organisasi sektor swasta;
2. Rasio Struktur Modal adalah bagaimana cara perusahaan mendanai aktivitya. Aktiva perusahaan didanai dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal pemegang saham sehingga seluruh sisi kanan dari neraca memperlihatkan struktur keuangan;
3. Rasio Aktivitas mengukur seberapa efektif entitas memanfaatkan semua sumber dana yang ada pada pengendaliannya. Semua rasio aktivitas ini

melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva;

4. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin tingginya profitabilitas

2.2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2.2.1. Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas..

Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya pengagenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah daerah yang dikelola “secara bisnis”, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

2.2.2. Tujuan dan Azaz Dibentuknya Badan Layanan Umum

Dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 disebutkan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Yang dimaksud dengan dengan praktek-praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan manajemen berkesinambungan. Sedangkan azaz Badan Layanan Umum Daerah adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.
2. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk.
3. BLU tidak mencari laba.
4. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLUD dengan instansi induk tidak terpisah.
5. Pengelolaan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

2.2.3. Karakteristik Badan Layanan Umum

BLUD memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan instansi pemerintah lainnya, yaitu (Sie Infokum-Ditama Binbangkum BPK, 2008):

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak bertujuan untuk mencari laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas ala korporasi.
5. Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLDU bukan subjek pajak.

Bentuk keistimewaan atau *privilege* dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD antara lain (Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD, 2010):

1. Pendapatan operasional dapat digunakan langsung sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara, namun seluruh pendapatan tersebut merupakan PNBP yang wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Anggaran belanja Badan Layanan Umum Daerahialahdana yang fleksibel menurut kesetaraan antara *value* kegiatan pelayanan dengan total pengeluaran anggaran belanja, belanja dapat bertambah atau berkurang dari

yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait dengan bertambah atau berkurang, setidaknya proporsional.

3. Dalam rangka pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah dapat merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan/tagihan, menyimpan kas dan mengelola rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan memanfaatkan kas yang menganggur (idle cash) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
4. Badan Layanan Umum Daerah dapat menambah nilai ketika piutang dan utang dikelola, diselesaikan dan diselesaikan secara tertib, efisien, hemat biaya, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan praktek-praktek bisnis yang sehat
5. Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Pengadaan barang dan jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang sumber pendanaannya berasal dari pendapatan operasional perusahaan, hasil kerjasama dengan pihak lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang atau jasa yang ditetapkan pimpinan Badan Layanan Umum Daerahserta hibah tidak terikat.
7. Badan Layanan Umum Daerahdapat mengembangkan kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
8. Badan Layanan Umum Daerahdapat memperkerjakan tenaga profesional non PNS.

9. Pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

2.3. Penerapan (Implementasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan (*implementasi*) terjadi apabila sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau suatu rencana telah disusun dengan baik terlebih dahulu sehingga telah ada kepastian dan kejelasan tentang rencana tersebut. Penerapan sistem atau implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau efek pada sesuatu. Ini adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara serius dan yang menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.4. Sistem

Sistem menurut Mulyadi (2017:2) adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga terdiri dari unsur-unsur yang merupakan bagian terpadu dari berbagai subsistem yang bersangkutan. Unsur-unsur sistem tersebut juga bekerja bersama untuk mencapai tujuan dari subsistem itu sendiri dan bagian dari sistem lain yang lebih besar dalam mendukung pencapaian tujuan.

2.5. Manajemen

Secara etimologi atau bahasa, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu *management* yang merupakan seni dalam mengatur, mengelola dan melaksanakan. Manajemen dapat juga diartikan sebagai upaya atau usahapengoordinasian, pengontrolan, perencanaan, serta pengorganisasian sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Inilah yang mendasari bahwa pengertian manajemen ialah sebuah seni. Seni dalam arti dekat dengan keindahan. Suatu keindahan manajemen yang teratur, rapi, dan tersusun rapih.

Menurut Firmansyah (2018:4) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Sarinah & Mardalena (2017:7) manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Menurut Afandi (2018:1) Manajemen adalah proses kerja sama antar karyawan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsifungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses tersebut dapat menentukan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya untuk mencapai hasil lebih yang efisien dan efektif.

Fungsi manajemen ialah untuk mengatur dan membuat tatanan tersusun yang rapih. Manajemen mengatur yang belum teratur sedemikian rupa sehingga diubah menjadi pola baru. Selain konsep etimologis, konsep manajemen juga dikemukakan oleh para profesional di bidang manajemen.

2.6. Penelitian Terlebih Dahulu

Penelitian-penelitian terlebih dahulu berkaitan dengan analisis penerapan sistem pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo di tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penelitian Terlebih Dahulu

No.	Nama Judul dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Trie Nadilla, Hasan Basri, Heru Fahlevi(2017)Identifikasi Permasalahan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)-Studi Kasus Pada Rumah Sakit Permata dan Rumah Sakit Berlian	Deskriptif Kualitatif	Hasil peneiltian menunjukkan rumah sakit tidak mampu menyajikan informasi akuntansi yang komprehensif karena laporan keuangan dihasilkan dari basis yang berbeda pelaporan keuangan berbasis akrual sementara anggaran berbasis kas, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang mumpunidan kurangnya komitmen manajemen untuk menerapkan konsep BLUD sebagai entitas bisnis.
2	Reni Riawati,	Deskriptif	Awal proses implementasi banyak

	Firman Pribadi (2018) Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul.	Kualitatif	dijumpai hambatan yang bersumber dari ketidakfahaman SDM baik dari manajemen maupun keuangan. Tidak adanya piranti pendukung berupa SK Bupati atau Peraturan Bupati serta kurangnya kompetensi SDM keuangan. Tahun 2011-2012 disusun 15 petunjuk pelaksana berbentuk SK dan Peraturan Bupati, tahun 2012 SDM keuangan diganti dengan personil berbasis akuntansi. Dengan BLUD SDM didorong untuk bekerja dengan efektif dan efisien, karena BLUD merupakan badan nirlaba yang tidak mencari keuntungan. RSUD dapat berkembang bila pendapatan dikelola secara efisien dengan penganggaran yang berorientasi pada standar mutu SPM.
3	Mia Khairina (2017) Analisis Implementasi Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.	Deskriptif Kualitatif	1)RSSA ditetapkan sebagai BLUD dengan status BLUD penuh pada tanggal 30 Desember 2008. Sebagai BLUD penuh, berarti dalam hal pengelolaan keuangannya, RSSA diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan fleksibilitas PK BLUD. 2)Implementasi fleksibilitas PK BLUD pada RSSA sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan diterapkannya nilai-nilai fleksibilitas

			pada tiap aspek pengelolaan keuangannya.
4	U. Vina Dwirista (2017) Analisis Penerapan Pola Penelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas	Deskriptif Kualitatif	Aktivitas-aktivitas penerapann PPK-BLUD pada RSUD Sambas sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Namun demikian, penerapan PPK-BLUD pada RSUD Sambas belum semuanya dapat berjalan secara sempurna dan optimal.
5	Riani Isye Kawenas, dkk (2019) Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori.	Penyajian laporan keuangan badan layanan umum pada RSUP Prof Dr. R. D. Kandou berdasarkan PSAP Nomor 13 telah diterapkan, namun belum secara keseluruhan, khususnya dalam mengakui pendapatan atas Kerjasama Operasional (KSO). Dalam penyusunan laporan keuangan masih ditemukan beberapa kendala antara lain (1) belum adanya regulasi yang jelas tentang pengertian KSO, (2) belum tersedianya aturan tambahan atau petunjuk teknis untuk menjabarkan penerapan PSAP Nomor 13 untuk KSO, (3) kurangnya

			<p>komunikasi dari Kementerian Kesehatan RI kepada Rumah Sakit yang mengakibatkan kurangnya SDM yang memahami dan (4) adanya pengaruh penerapan PSAP Nomor 13 terhadap target realisasi PNBP pengaruh penerapan PSAP Nomor 13 pada penilaian kinerja Rumah Sakit. Karena pentingnya satuan kerja untuk patuh pada regulasi ini maka perlu diupayakan kebijakan pendukung untuk memastikan implementasi PSAP Nomor 13 berjalan sesuai ketentuan.</p>
6	<p>Bambang Azis Silahahi, dkk (2022) Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa setelah penerapan PPK-BLUD di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai, terdapat perubahan dimana sebelumnya proses pengelolaan anggaran, keuangan, dan pelaporan yang selama ini murni harus berdasarkan peraturan keuangan dengan mekanisme APBD. Namun dengan penerapan PPK-BLUD, seluruh pendapatan yang peroleh RSUD Djoelham dapat langsung dikelola dan dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan RSUD. Sehingga diharapkan dapat memperingkas birokrasi khususnya keuangan sehingga pada akhirnya</p>

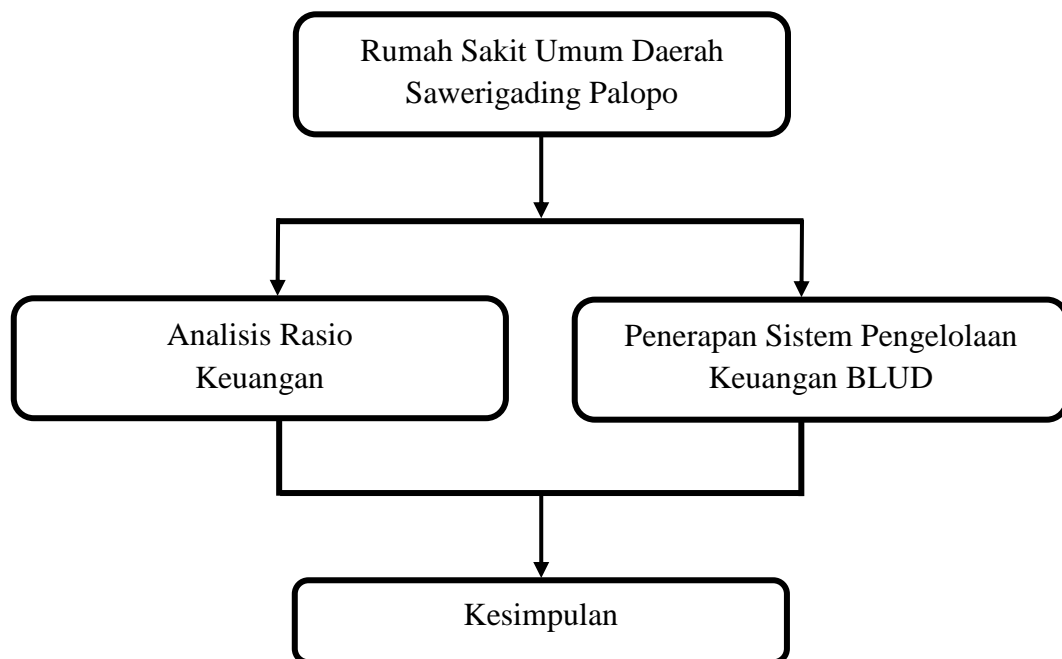
			dapat meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi terutama pemahaman bagian dan bidang lain tentang PPK-BLUD yang ada di RSUD Djoelham Binjai sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antar bagian dan bidang.
7	Syahril (2017) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.	Deskriptif Kualitatif	RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007, hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa aturan yang belum dipenuhi. Rumah Sakit juga belum menggunakan semua laporan keuangan yang ditetapkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 hal ini dapat dilihat dari laporan semesteran.
8	Nanang Nopriandy P (2017) Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dapat dilihat laporan kinerja keuangan, untuk dapat menilai kinerja penelitian ini beracuan pada penentuan skor kinerja keuangan yang sama dengan Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan tertuang pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-

	(RSUD) Haji Makassar		24/PB/2014. Rasio kas sebesar 210,65% itu berarti skor rasio kas BLUD RSUD Haji Makassar sebesar 1,5. Rasio lancar sebesar 384,75% itu berarti rasio lancar BLUD RSUD Haji Makassar 1,5.
9	Ratna Suryaningsih (2018) Kinerja Keuangan Layanan Kesehatan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU	Balanced Scorecard dengan strategi pengumpulan data secara ganda (triangulasi).	Penerapan BLU pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tidak memberikan perubahan yang signifikan pada Activity Growth. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan pertumbuhan tingkat pelayanan yang dilihat dari peningkatan volume kegiatan tidak terjadi perbedaan dengan adanya penerapan BLU pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.
10	Haryati, Nuning Tri (2017) <i>Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah prof. dr. margono soekarjo purwokerto</i> . Skripsi	Deskriptif Kualitatif	Sistem aplikasi yang terintegrasi dapat membantu kontrol dan evaluasi. Sistem reward dan punishment atas pencapaian kinerja. Birokrasi yang jelas sehingga tupoksi dan SOP didalam pencapaiannya dapat berjalan. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yaitu: Budaya ewuh pakewuh masih melekat pada penilaian kinerja pegawai. Transfer knowledge yang belum tuntas bila

	thesis, Universitas Jenderal Soedirman.		terjadi mutasi dan rotasi pegawai sehingga menghambat kelancaran sistem pelaporan dan evaluasi. Reward masih berupa reward individu, belum ada reward untuk unit yang berhasil mencapai target anggaran
--	-----------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual analisis penerapan sistem pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moloeng (2018) ialah penelitian yang bertujuan agar memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh partisipan seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Sehingga pada penelitian ini data yang telah dikumpulkan merupakan data kualitatif dengan instrumen pengumpul data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dan data yang di peroleh cenderung data kualitatif dengan teknik analisis data yang bersifat kualitatif(Sugiyono, 2019). Untuk mengetahui penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo, penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan prepenelitian di RSUD Sawerigading Palopo, agar diperoleh data primer dan data sekunder. Data pendukung dikumpulkan dari bagian terkait yang meliputi RBA, RSB, SPM, laporan keuangan, kerjasama RSUD dengan pihak luar, data pegawai, deskripsi fisik rumah sakit, data organisasi dan manajemen
2. Melakukan wawancara menggunakan panduan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pegawai dan staf di RSUD Sawerigading Palopo. Pelaksanaannya menggunakan media perekam dan catatan lapangan (*field notes*).

3. Tabulasi hasil pertanyaan serta analisis data
4. Menggunakan penilaian aspek keuangan sebagaimana yang dimaksud meliputi rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD.

3.2. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi untuk mengamati dengan cermat terhadap obyek penelitian. Agar memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung kelapangan. Dalam mengumpulkan data, peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo yang mana adalah lokasi penelitian sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ialah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Adapun lokasi penelitian ini adalah Rumah Sakit Sawerigading Palopo dan kemudian waktu penelitian yang akan diperkirakan dan dilaksanakan pada Juni 2022 sampai dengan agustus 2022.

3.4. Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada

pihak yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan dikumpulkan pihak lain.

Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara pihak yang berkaitan seperti wawancara kepada :

1. Kepala Bagian Keuangan,
2. Sub. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan,
3. dan Sub. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun 2020-2021 yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat penting karena berhubungan dengan tersedianya data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah benar. Oleh karena itu dalam penelitian, teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat dan benar.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Observasi

Observasi merupakan observasi langsung dan mendetail terhadap objek untuk memperoleh informasi yang benar tentang objek tersebut. penelitian yang diperiksa dan diamati dirancang untuk mengumpulkan data atau skor. Observasi pada penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana

penerapan sistem pengelolaan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

b. Wawancara

Penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap staf Sub. Anggaran dan Perbendaharaan RSUD Sawerigading Palopo untuk proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara penanya dan penjawab.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan dan dokumentasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip arsip-arsip dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1. Variabel Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang dikembangkan, proses penerapan sistem pengelolaan keuangan (PPK-BLUD) RSUD Sawerigading Palopo dianalisa melalui variabel berikut:

1. Pengelolaan keuangan BLUD
2. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

3.6.2. Definisi Operasional

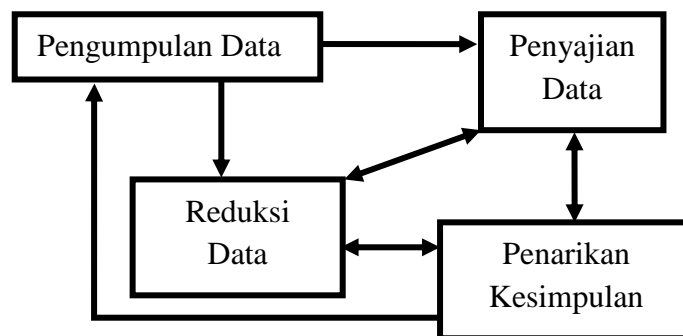
1. Pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo telah diterapkan sesuai dengan dengan surat keputusan Walikota Palopo tanggal 09 April 2012 nomor : 397/IV/2012 tentang penetapan Rumah Sakit Umum

Daerah Sawerigading Kota Palopo sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD penuh, dan mulai diterapkan sejak 01 Januari 2014.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo merupakan salah satu unit pelayanan jasa dibidang medis di Kota Palopo yang melayani jasa rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

3.7. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2015). Langkah-langkah analisis data tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:



Gambar 3.1 :Analisis Data Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015)

Selain menggunakan analisis data Model Miles Huberman, penelitian ini juga menggunakan analisis rasio keuangan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan pengelolaan keuangan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

3.7.1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Pengumpulan data pengelolaan keuangan pada RSUD Sawerigading Palopo melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca yang kemudian akan dicatat oleh penulis.

3.7.2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh dilapangan. Reduksi data pengelolaan keuangan pada RSUD Sawerigading Palopo dilakukan selama penelitian berlangsung hingga laporan tersusun. Reduksi data pengelolaan keuangan ialah bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menonjolkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak dipergunakan, dan mengorganisasi data agar simpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Tahap kedua peneliti memilih data yang didapat dan disusun secara urut dan tertata rapih.

3.7.3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data keuangan RSUD Sawerigading Palopo yang telah di Reduksi kemudian dilakukan penyajian data. Penyajian data yaitu data dan informasi yang di dapat dari lapangan dan Laporan Realisasi Keuangan (LRA) dan Neraca dimasukan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di RSUD Sawerigading, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian

data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Tahap ketiga setelah peneliti menyusun data secara urut untuk melakukan pengolahan data.

3.7.4. Rasio Keuangan

Rasio Keuangan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan RSUD Sawerigading Palopo. Pada penelitian ini perlu diadakan interpretasi atau analisa terhadap data keuangan dari RSUD Sawerigading Palopo dan akan tercermin di dalam Laporan Realisasi Anggaran yang sama dengan regulasi mencakup pengukuran akan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014, Pasal 4:3):

- a. Rasio Kas, digunakan untuk melihat perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jk. Pendek}} \times 100\%$$

- b. Rasio Lancar, digunakan untuk melihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jk. Pendek}} \times 100\%$$

- c. Periode Penagihan Piutang, digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun;

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

- d. Perputaran Aset tetap, digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap;

Rumus:
$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

- e. Imbalan atas Aset Tetap, untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/ kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan;

Rumus:
$$\frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan dan Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

- f. Imbalan Ekuitas, digunakan untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungannya kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/defisit tahun berjalan;

Rumus:
$$\frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan dan Kerugian}}{\text{Ekuitas - Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan dan Kerugian}} \times 100\%$$

- g. Perputaran Persediaan, digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha;

Rumus:
$$\frac{\text{Total Persediaan} \times 365}{\text{Pendapatan BLUD}} \times 1 \text{ hari}$$

- h. Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional, yang digunakan untuk melihat perbandingan antara penerimaan PNBPN dengan biaya operasional ;

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

- i. Rasio Biaya Subsidi, yang digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah subsidi biaya pasien dengan pendapatan BLU.

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Subsidi Biaya Pasien}}{\text{Pendapatan BLUD}} \times 100\%$$

3.7.5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion, Drawing/Verifying*)

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan data keuangan dan analisis rasio yang telah dilakukan. Setelah data pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawergading Palopo terkumpulkan harus segera diverifikasi dengan cara melihat catatan kembali agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data dapat dimengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil RSUD Sawerigading Palopo

4.1.1. Sejarah RSUD Sawerigading Palopo

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Palopo sebelumnya adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang dibangun pada masa Pemerintahan Belanda ditahun 1920. RSUD Sawerigading merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada pada pusat Pemerintahan Kerajaan Luwu, dalam perjalanan telah mengalami dua kali renovasi yakni renovasi pertama pada tahun 1981-1982, di masa Pemerintahan Bupati Luwu Drs. Abdullah Suara dan peresmianya dilikakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Oddang. Renovasi kedua dilakukan pada tahun 2001-2002 di masa Pemerintahan Bupati Luwu Dr. H. Kamrul Kasim, S.H, M.H. Banyak bagian bangunan yang telah tidak layak digunakan untuk sebuah Rumah Sakit sehingga memungkinkan sulit untuk di pertahankan keaslian bangunannya.

Ketika Kota Administrasi Palopo sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu mengalami perubahan status menjadi kota Otonom berdasarkan UU No. 11 Tahun 2002, RSUD Sawerigading Palopo pun beralih induk dari Pemerintah Kabupaten Luwu ke Pemerintah Kota Palopo. Sebagai unit pelayanan publik yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palopo tanggal 9 April tahun 2012 nomor : 397/IV/2012 tentang Penetapan RSUD Sawerigading Kota Palopo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status BLUD penuh, meski penerapan pelaksanaannya baru dimulai 1 Januari 2015 dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading adalah Rumah Sakit yang sebelumnya memiliki status Tipe C tahun 1994 yang kini telah dilakukan peningkatan menjadi Rumah Sakit dengan status Tipe B pada Tahun 2015 berdasarkan SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 9 tahun 2002 RSUD Sawerigading Kota Palopo yang sebelumnya sebagai kantor berubah menjadi Badan Pengelola. RSUD Sawerigading Palopo telah dilakukan relokasi di jalan Dr. Ratulangi Km.7 Kecamatan Rampoang Poros Trans Sulawesi, sebelah Utara Kota Palopo.

4.1.2. Fasilitas dan Layanan RSUD Sawerigading Palopo

Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading juga sebagai rumah sakit rujukan untuk wilayah Palopo dan sekitarnya. Berikut adalah layanan-layanan serta fasilitas yang ada di RSUD Sawerigading Palopo :

1. Fasilitas dan layanan terdiri dari; Ambulance, IGD, Farmasi, Bank Darah, Ruang Operasi dan Isolasi, Instalasi Gizi, dan Ruang Perawatan Jenazah
2. Penunjang medis terdiri dari; Laboratorium, Radiologi, Ultrasonografi, Elektrokardiogram, Elektroensefalografi, Fisioterapi, dan Hemodialisa

3. Rawat jalan (poliklinik) terdiri dari; Poli Penyakit Dalam, Poli Kandungan / Obgin, Poli THT, Poli Paru, Poli Psikiatri / Kejiwaan, dan poliklinik lainnya.
4. Rawat inap pasien terdiri dari; Perawatan Khusus dan Intensif serta Perawatan Umum

Perkembangan serta penambahan fasilitas pelayanan yang terus dilakukan oleh RSUD Sawerigading Palopo selama ini menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan para pelanggan setia yang telah memilih RSUD Sawerigading Palopo sebagai mitra dalam memberi layanan kesehatan. Penambahan fasilitas di tahun 2021 meliputi USG, ECG serta Laparascopy. Selain penambahan peralatan kesehatan RSUD Sawerigading Palopo juga melakukan renovasi serta perluasan berbagai fasilitas seperti renovasi ICU, penambahan ruanga perawatan, dan lain-lain. Penambahan serta perluasan fasilitas diharapkan menunjang proses pelayanan sesuai dengan kemajuan teknologi yang dimiliki.

4.1.3. Visi dan Misi RSUD Sawerigading Palopo

A. Visi

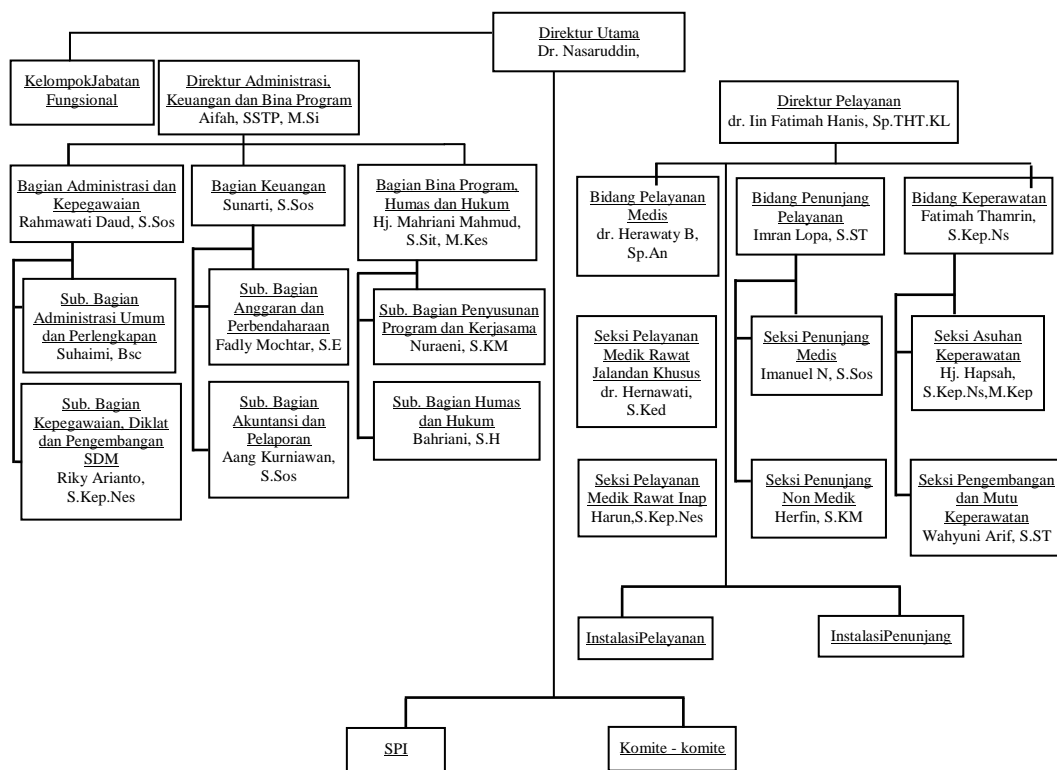
“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Terpercaya di Sulawesi Selatan Tahun 2023.”

B. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkeadilan, dan sesuai standar akreditasi rumah sakit.
2. Menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.

3. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya rumah sakit secara berkelanjutan.

4.1.4. Struktur Organisasi RSUD Sawerigading Palopo



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

4.1.5. Informan Penelitian

Adapun informan pada penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan, Sub. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, dan Sub. Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Yakni sebagai berikut :

a. Nama Informan : Sunarti, S.Sos

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan



Gambar 4.2 : Wawancara dengan informan 1

b. Nama Informan : Fadly Mochtar, S.E

Jabatan : Sub. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan



Gambar 4.3 : Wawancara dengan informan 2

c. Nama Informan : Aang Kurniawan, S.Sos

Jabatan : Sub. Bagian Akuntansi dan Pelaporan



Gambar 4.4 : Wawancara dengan informan 3

4.2. Proses Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo di mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai pada tanggal 11 Agustus 2022. Dalam proses pengambilan data, hal pertama yang dilakukan peneliti yaitu berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo untuk menemui Kepala Bagian

Kuangan sekaligus menyerahkan surat pengantar izin untuk melakukan penelitian (Senin, 13 Juni 2022). Dan selanjutnya melakukan pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta menemui Informan lainnya.

4.3. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan BLUD

Data yang dihasilkan dalam proses penelitian ini akan dideskripsikan yakni diawali terlebih dahulu oleh deskripsi mengenai data-data. Data yang diuraikan diantaranya mengenai deskripsi lokasi penelitian yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo. Temuan pada penelitian ini merupakan hasil

dari wawancara dengan informan, lalu melakukan observasi dalam kegiatan interaksi informan untuk menemukan data yang diperlukan dan melakukan dokumentasi. Penguraian hasil penelitian berupa deskripsi data-data dan tabel yang disusun berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan-informan.

Pada penelitian ini akan dipaparkan temuan peneliti sebagai hasil penelitian dari pengumpulan data dan pengolahan data yang ditemukan di lokasi penelitian. Data-data yang didapat pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian yang di peroleh dari lokasi penelitian dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan awal penelitian. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai penelitian yang akan dijabarkan dalam sub-sub sebagai berikut:

4.3.1. Landasan Hukum

Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo tentunya mempunyai pegangan landasan hukum yang berlaku untuk mendasari penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD. Agar nantinya penyusunan laporan keuangan pada RSUD Sawerigading Palopo dapat berjalan dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diungkapkan informan bapak Fadly Mochtar, S.E sebagai berikut :

“Landasan hukum yang diterapkan untuk penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14 tentang Badan Layanan Umum Daerah.”

Adapun penjelasan lebih lengkap mengenai landasan hukum yang menjadi pedoman RSUD Sawerigading Palopo untuk penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD yang dikutip dari Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14.

RSUD Sawerigading Palopo mengubah pola penyusutan yang dilaksanakan atas rekomendasi BPK agar RSUD Sawerigading Palopo mengadopsi Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018. Pemerintah melalui Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 telah mengatur keputusan untuk menjalankan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD dan mengikuti peraturan tersebut dengan penuh hati-hati agar tidak masuk dalam ranah pidana. RSUD Sawerigading Palopo telah menjalankannya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018.

4.3.2. Proses, Maksud dan Tujuan Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan BLUD

Dalam proses penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo menerapkan praktek-praktek

Pada Rumah Sakit tentunya memiliki tujuan dan maksud tersendiri dalam mencapai pengelolaan keuangan yang baik. Tak terkecuali RSUD Sawerigading Palopo yang memiliki maksud dan tujuan tertentu agar terwujudnya pelaksanaan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD dengan baik, berikut adalah ungkapan informan bapak Fadly Mochtar, S.E selaku sub. Bagian keuangan dan perbendaharaan RSUD Sawerigading Palopo :

“Penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD memiliki maksud yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara fleksibilitas dalam hal pola pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan kepegawaian. Selain itu, juga memiliki tujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang didelegasikan oleh Kepala Daerah.”

Dalam mewujudkan misi Rumah Sakit mempunyai tujuan umum yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya pengobatan, pemulihan, pencegahan, promosi kesehatan Rumah Sakit, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya ialah meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat serta mengupayakan Rumah Sakit agar mampu menjadi pengelola pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan pendidikan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pasien.

RSUD Sawerigading Palopo dengan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD diharap mampu dan bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan landasan hukum Permendagri Nomor 79 tahun tentang Badan Layanan Umum Daerah dengan memberikan fleksibilitas pada

pengelolaan keuangan mengikuti prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

4.3.3. Peran Penting dalam Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan BLUD

Adanya penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD atau yang biasa disebut dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dalam Rumah Sakit Umum Daerah memiliki peran tersendiri untuk membangun kualitas Rumah Sakit yang terbaik. Seperti yang disampaikan oleh bapak Aang Kurniawan, S.Sos selaku sub. Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada RSUD Sawerigading Palopo, sebagai berikut :

“Peran penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading palopo sangat penting, karena laporan keuangan BLUD itu dikonsolidasikan dengan laporan pemerintah daerah. Jadi kinerja BLUD itu mencerminkan kinerja pemerintah Kota Palopo juga dan semakin naik pendapatan RSUD Sawerigading Palopo itu maka akan mempengaruhi kualitas kerja Kota Palopo”

Dikutip dari pernyataan informan bapak Aang Kurniawan, S.Sos yang mengatakan bahwa penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD berperan penting pada RSUD Sawerigading Palopo dalam penggunaan lingkungan Rumah Sakit dan masyarakat, juga berperan penting untuk pemerintahan Kota Palopo untuk meningkatkan kualitas kerja.

Tanpa adanya penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo akan berdampak pada kekurangan dalam hal pengelolaan keuangan serta laporan pemerintah yang *disable*(Cacat). Sehingga apabila

pendapatan yang diperoleh RSUD Sawerigading Palopo meningkat maka sangat berpengaruh pada meningkatnya kualitas kerja baik internal (RSUD Sawerigading Palopo) maupun bagi eksternal (Pemerintah).

4.3.4. Kendala Internal dan Eksternal Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo

Dalam pengelolaan keuangan juga terdapat kendala-kendala tertentu baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi berjalannya penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD. Tak terkecuali dengan RSUD Sawerigading Palopo yang memiliki beberapa kendala dalam pengelolaan keuangannya, seperti yang dikatakan informan bapak Aang Kurniawan, S.Sos sebagai berikut menjelaskan tentang kendala eksternalnya :

“Kendala yang datang dari eksternal itu pada saat RSUD Sawerigading Palopo melakukan pencatatan transaksi secara akrual. Jadi ketika ada barang yang dipesan dan diaadakan itu ketika tiba di tempat tidak disertai dengan dokumen. Artinya dokumennya terlambat tiba, sementara pegawai dan staf dipengurusan barang ketika barang yang masuk itu diterima harus disertai dengan dokumen untuk dilakukan pencatatan pengeluaran masuk. Pada saat barang tidak disertai dokumen disitulah kendalanya karena barang yang masuk biasanya langsung akan digunakan. Dan pada saat mau digunakan dan dokumennya baru tiba, nah disitulah kendala terjadi, pegawai dan staf dari PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) pada saat staf mau menyangdingkan antara barang pesanan dengan fisiknya

(barang yang masuk) itu fisiknya sudah digunakan, apalagi kalau barang habis pakai sulit untuk disandingkan dengan dokumennya.”

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) merupakan tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. PPHP pada RSUD Sawerigading Palopo ketika menerima barang yang masuk, perlu melakukan pelaporan dan pencatatan agar dokumen dan barang yang tersedia serta yang telah terpakai diketahui dan tervalidasi bahwa adanya fisik (barang yang masuk) dengan dokumen. Ketika dokumen dan barang yang masuk datang dengan terpisah maka akan terjadi kesulitan dalam penyandingan barang. Perlu adanya ketepatan waktu dalam proses pelaporan dan masuknya barang ke RSUD Sawerigading Palopo untuk mencapai proses penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD yang tepat.

Tentunya pada RSUD Sawerigading Palopo tak hanya memiliki kendala dari eksternal, tetapi juga terdapat kendala internal dimana peneliti telah melakukan wawancara dengan ibu Sunarti, S.Sos yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan ini mengemukakan adanya kendala internal sebagai berikut :

“Kalau faktor internalnya itu, ya SDM dari RSUD Sawerigading Palopo masih terbatas. Karena, sebenarnya penerapan sistem pengelolaan melalui aplikasi itu sudah lebih tepat dan pada saat pencatatan barang masih membutuhkan beberapa bantuan SDM sehingga memudahkan dan melancarkan setiap laporan yang ada”

Sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk menentukan kelangsungan kegiatan pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading Palopo.

SDM yang berkualitas dapat menciptakan keberhasilan Rumah Sakit dalam menyusun perencanaan sistem pengelolaan keuangan BLUD, serta melaksanakan kegiatan operasional dan mengendalikan Rumah Sakit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan masih mengalami kendala yaitu kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada RSUD Sawerigading Palopo khususnya dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pada bagian pencatatan kurangnya SDM dalam pelaporan mengakibatkan keterlambatan pelaporan sehingga dalam hal ini masih belum optimal.

4.3.5. Laporan Keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo

1. Pengukuran Aset

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki Rumah Sakit ketika melakukan proses operasinya serta komponen penting karena menunjang berjalannya aktivitas. Nilai aset Rumah Sakit akan terus diperbarui dan harus di laporkan dalam laporan keuangan Rumah Sakit. Aset RSUD Sawerigading Palopo diukur sebagai berikut :

a. Kas

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum Rumah Sakit. Kas dicatat sebesar nominal.

b. Investasi

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi

tersebut. Sedangkan investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang pendapatan dituliskan diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

2. Pendapatan

“Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, penerimaan surplus, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya pada Tahun Anggaran 2021. Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp.66.576.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.67.527.517.901,27 atau 101,43%” (Sunarti, S.Sosinforman RSUD Sawerigading Palopo). Pendapatan operasional yang diperoleh selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp.79.865.437.532,00

Tabel 4.1. : Pendapatan dalam LRA

Uraian	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2020
		Nilai	%	
Pendapatan Jasa Layanan	66.415.200.000	67.317.783.832	101,38	106.492.988.729
Pendapatan Hasil	103.200.000	147.357.000	142,81	188.969.000
Lain-lain pendapatan BLUD	57.600.000	62.359.069	108,26	901.836.211
Pendapatan hibah	-	-	-	-
Jumlah	66.576.000.000	67.527.517.901	101,43	109.583.793.941

Pendapatan APBD mengalami penurunan dari Rp.69.130.445.034,00 pada periode 2020 menjadi Rp.56.486.928.057,00 pada periode 2021 atau menurun sebesar 18%

3. Belanja

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada RSUD Sawerigading Palopo direncanakan sebesar Rp.64.126.550.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.63.521.877.751,00 atau 99,06%. Terdapat sisa anggaran Rp.604.672.249,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada RSUD Sawerigading Palopo direncanakan sebesar Rp.35.780.100.471,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.33.396.158.874,13 atau 93,34%. Terdapat sisa anggaran Rp.2.383.941.596,87.

c. Belanja Modal

Belanja modal pada RSUD Sawerigading Palopo direncanakan sebesar Rp.27.844.006.737,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.27.157.334.073,00 atau 97,53%. Terdapat sisa anggaran Rp.686.672.664

Tabel 4.2. : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Nilai	%
1.	Belanja Operasi	99.906.650.471,00	96.918.036.625,13	97,01
	Belanja pegawai	64.126.550.000,00	63.521.877.751,00	99,06
	Belanja barang dan jasa	35.780.100.471,00	33.396.158.874,13	93,34
2.	Belanja Modal	27.844.006.737,00	27.157.334.073,00	97,53
	Belanja tanah	-	-	-
	Belanja peralatan medis	27.844.006.737,00	27.157.334.073,00	
	Belanja gedung dan bangunan	-	-	
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	-	-	
	Belanja aset tetap lainnya	-	-	
	Jumlah	127.750.657.208	124.075.370.698	97,12

4. Aset

A. Aset Lancar

a. Kas Bendahara BLUD

No. Rekening koran 170-00-9999202-00	Rp.4.070.081.628,00
Kas BLUD	Rp.327.060.395,00
kas SKPD	Rp. 0,00
kas Penerimaan BLUD	<u>Rp.4.257.048,00</u> +
Jumlah	Rp.4.401.398.971,00

b. Piutang

Adalah piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp.27.624.303.908,00

terdiri dari :

Piutang BPJS	Rp.9.151.196.053,00
Piutang Jampersal	Rp. 0,00
Piutang Kerjasama Inhealth	Rp. 0.00
Piutang Kerjasama (Jasa Raharja)	Rp.429.224.655,00
Piutang Kerjasama (Parkir)	Rp.10.500.000,00
Piutang pasien (BPJS)	<u>Rp.18.033.383.200,00+</u>
Jumlah	Rp.27.624.303.908,00

c. Persediaan Bahan Habis Pakai

Adalah persediaan bahan habis pakai per 31 Desember 2021.

Persediaan Obat-obatan	Rp.2.430.209.207,00
Persediaan BHP Alkes	Rp.2.816.270.998,00
Persediaan ATK	Rp.9.435.199,00

Persediaan Cetak Rekam Medik	Rp.68.483.00,00
Persediaan Alat Kebersihan	Rp.35.963.610,00
Persediaan Alat Kantor & Rumah Tangga	Rp.607.200,00
Persediaan Tabung Oxygen	Rp.2.827.000,00
Persediaan Alat Listrik	Rp.11.142.627,00
Persediaan Alat Dapur	Rp.32.053.500,00
Persediaan Mamin Petugas	Rp.4.922.407,00
Persediaan Mamin Pasien	Rp.13.143.383,00
Persediaan Pakaian Kerja	<u>Rp.36.422.350,00</u> +
Jumlah	Rp.5.461.480.481,00

B. Aset Tetap

a. Tanah

Adalah aset tetp per 31 Desember 2021

Saldo Awal	Rp.3.641.520.400,00
Pengadaan s/d 31 Desember 2021	<u>Rp. 0,00</u> +
Saldo per 31 Desember 2021	Rp.3.641.520.400,00

b. Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per tanggal 31 Desember 2021 dalah sebesar Rp.184.704.960.543,00 dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin (SKPD)	Rp.116.064.142.638,00
Peralatan dan Mesin (BLUD)	Rp.58.985.154.696,00
Peralatan dan Mesin (APBN)	<u>Rp. 0,00</u> +
Jumlah	Rp.175.049.297.334,00

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan (SKPD)	Rp.102.171.374.443,00
Gedung dan Bangunan (BLUD)	Rp.3.349.643.786,00
Gedung dan Bangunan (APBN)	<u>Rp. 0,00</u> +
Jumlah	Rp.105.521.018.229,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan (SKPD)	Rp.7.451.322.316,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan (BLUD)	<u>Rp.245.834.000,00</u> +
Jumlah	Rp.7.697.156.316,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Rp.4.150.000,000
Penambahan	<u>Rp.991.000,00</u> +
Jumlah	Rp.5.141.000,00

C. Aset Lainnya

Adalah aset lainnya per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Aset Tidak Berwujud	Rp.15.107.975,00
Aset Tetap Lain-lain	<u>Rp.804.680.129,00</u> +
Jumlah	Rp.819.788.104,00

5. Kewajiban

A. Utang Usaha

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang per 31 Desember 2021 dengan rincian :

Hutang Obat	Rp.7.047.801.444,00
-------------	---------------------

Hutang BHP Alkes	Rp.18217.252.007,00
Hutang Oxygen	Rp.116.490.000,00
Hutang BM	Rp.320.380.432,00
Hutang Persediaan dan Biaya	<u>Rp.3.461.331.668,00</u> +
Jumlah	Rp.29.163.255.551,00

B. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah tersebut merupakan pinjaman dari Bank per 31 Desember 2021 belum terbayar. Rincian hutang pada Bank pada tanggal neraca sebagai berikut :

Hutang pada BNI	Rp.521.500,00
Hutang pada Bank Mandiri	<u>Rp. 0,00</u> +
Jumlah	Rp.521.500,00
Total Utang	Rp.29.163.777.051,00

6. Ekuitas Dana

A. Ekuitas Dana Lancar

a. SILPA

Realisasi pendapatan	Rp.67.527.517.901,27
Realisasi belanja	Rp.124.075.370.698,00
SILPA tahun sebelumnya	Rp.14.261.802.211,00
Saldo per tanggal 31 Desember 2021	Rp.4.400.877.471,00

b. Cadangan Piutang

Adalah cadangan piutang per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.27.624.303.908,00

c. Cadangan Persediaan

Adalah cadangan persediaan per tanggal 31 Desember 2021

Persediaan Obat-obatan	Rp.2.430.209.207,00
Persediaan BHP Alkes	Rp.2.816.270.998,00
Persediaan ATK	Rp.9.435.199,00
Persediaan Cetak Rekam Medik	Rp.68.483.00,00
Persediaan Alat Kebersihan	Rp.35.963.610,00
Persediaan Alat Kantor & Rumah Tangga	Rp.607.200,00
Persediaan Tabung Oxygen	Rp.2.827.000,00
Persediaan Alat Listrik	Rp.11.142.627,00
Persediaan Alat Dapur	Rp.32.053.500,00
Persediaan Mamin Petugas	Rp.4.922.407,00
Persediaan Mamin Pasien	Rp.13.143.383,00
Persediaan Pakaian Kerja	<u>Rp.36.422.350,00</u> +
Jumlah	Rp.5.461.480.481,00

d. Dana yang harus disediakan bagi utang jangka pendek ialah akun lawan dari utang jangka pendek sebesar Rp.29.163.777.051,00 terdiri dari :

Hutang Obat	Rp.7.047.801.444,00
Hutang BHP Alkes	Rp.18217.252.007,00
Hutang Oxygen	Rp.116.490.000,00
Hutang BM	Rp.320.380.432,00
Hutang Persediaan dan Biaya	Rp.3.461.331.668,00

Hutang pada BNI	Rp.521.500,00
Hutang pada Bank Mandiri	Rp. <u>0,00</u>
Total Utang	Rp.29.163.777.051,00

B. Ekiutas Dana Investasi

Diinvestasikan kedalam aset tetap	Rp.207.621.215.324,00
Diinvestasikan kedalam aset lainnya	<u>Rp.819.788.104,00</u>
Saldo per tanggal 31 Desember 2021	Rp.208.441.003.428,00

4.3.6. Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Kas

Penentuan rasio kas berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.3. : Penentuan skor rasio kas

Rasio Kas dalam % (RK)	Skor
RK > 480	0,25
420 < RK ≤ 480	0,5
360 < RK ≤ 420	1
300 < RK ≤ 360	1,5
240 < RK ≤ 300	2
180 < RK ≤ 240	1,5
120 < RK ≤ 180	1
60 < RK ≤ 120	0,5
0 < RK ≤ 60	0,25
RK = 0	0

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio kas} &= \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jk. Pendek}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.4.401.398.971}}{\text{Rp.29.163.777.051}} \times 100\% \\
 &= 15,09\%
 \end{aligned}$$

RSUD Sawerigading Palopo mempunyai rasio sebesar 15,09%, maka skor rasio kas sebesar 0,25. Skor tersebut dinilai baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

2. Rasio Lancar

Penentuan skor radio lancar berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dihitung sebagai berikut :

Tabel 4.4. : Penentuan skor rasio lancar

Rasio Lancar % (RL)	Skor
RL > 600	2,5
480 < RL ≤ 680	2
360 < RL ≤ 420	1,5
240 < RL ≤ 360	1
120 < RL ≤ 240	0,5
0 < RL ≤ 120	0,25
RL = 0	0

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Lancar} &= \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Kewajiban Jk. Pendek}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.37.487.183.360}}{\text{Rp.29.163.777.051}} \times 100\% \\
 &= 128,54\%
 \end{aligned}$$

RSUD Sawerigading Palopo mempunyai rasio lancar sebesar 128,54%, maka skor rasio lancar sebesar 0,5. Skor tersebut dinilai baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

3. Periode Penagihan Piutang

Penentuan skor untuk periode penagihan piutang berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dihitung sebagai berikut :

Tabel 4.5. : Penentuan skor periode penagihan piutang

Periode Penagihan Piutang % (Hari) (PPP)	Skor
PPP > 30	2
30 ≤ PPP < 40	1,5
40 ≤ PPP < 60	1
60 ≤ PPP < 80	0,5
80 ≤ PPP < 80	0,25
PPP ≤ 100	0

$$\begin{aligned} \text{Periode penagihan piutang} &= \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 360 \text{ hari} \\ &= \frac{\text{Rp.27.624.303.908} \times 360}{\text{Rp.67.527.517.901}} \times 1 \text{ hari} \\ &= 147,27\% \end{aligned}$$

RSUD Sawerigading Palopo memiliki periode penagihan piutang sebesar 147,27%, maka skor rasio periode penagihan piutang sebesar 0. Skor tersebut dinilai baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

4. Perputaran Aset tetap

Penentuan skor perputaran aset tetap berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dihitung sebagai berikut :

Tabel 4.6. : Penentuan skor perputaran aset tetap

Perputaran Aset Tetap % (PAT)	Skor
PAT > 20	2
15 < PAT ≤ 20	1,5
10 < PAT ≤ 15	1
5 < PAT ≤ 10	0,5
0 < PAT ≤ 5	0,25
PAT = 0	0

$$\begin{aligned}
 \text{Perputaran aset tetap} &= \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.79.865.437.532}}{\text{Rp.105.729.848.396}} \times 100\% \\
 &= 75,54\%
 \end{aligned}$$

RSUD Sawerigading Palopo mempunyai rasio perputaran aset tetap sebesar 75,54%, maka skor rasio perputaran aset tetap sebesar 2. Skor tersebut dinilai baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

d. Imbalan atas Aset Tetap

Penentuan skor pada rasio imbalan atas aset tetap berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.7. : Penentuan skor imbalan atas aset tetap

<i>Return on Fixed Asset % (ROFA)</i>	Skor
ROFA > 6	2
5 < ROFA ≤ 6	1,7
4 < ROFA ≤ 5	1,4
3 < ROFA ≤ 4	1,1
2 < ROFA ≤ 3	0,8
1 < ROFA ≤ 2	0,5
0 < ROFA ≤ 1	0

$$\begin{aligned}
 \text{Imbalan atas Aset Tetap} &= \frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Pos Keuntungan dan Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.67.527.517.901} - \text{Rp.56.486.928.057}}{\text{Rp.105.729.848.396}} \times 100\% \\
 &= 10,44\%
 \end{aligned}$$

RSUD Sawerigading Palopo mempunyai rasio imbalan aset tetap sebesar 10,44%, maka skor rasio imbalan aset tetap sebesar 2. Skor tersebut dinilai baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

e. Imbalan Ekuitas

Penentuan skor rasio imbalan ekuitas berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dihitung sebagai berikut :

Tabel 4.8. : Penentuan skor imbalan ekuitas

<i>Return on Equity %</i> (ROE)	Skor
ROE > 8	2
7 < ROE ≤ 8	1,8
6 < ROE ≤ 7	1,6
5 < ROE ≤ 6	1,4
4 < ROE ≤ 5	1,2
3 < ROE ≤ 4	1
2 < ROE ≤ 3	0,8
1 < ROE ≤ 2	0,6
0 < ROE ≤ 1	0,4
ROE = 0	0

$$\begin{aligned}
 \text{Imbalan ekuitas} &= \frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum} \\
 &\quad \text{Pos Keuntungan dan Kerugian}}{\text{Ekuitas - Surplus atau Defisit Sebelum}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Pos Keuntungan dan Kerugian}}{\text{Rp.208.441.003.428 - Rp.67.527.517.901}} \times 100\% \\
 &= 7,84\%
 \end{aligned}$$

RSUD Sawerigading Palopo mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 7,84%, maka skor rasio imbalan ekuitas sebesar 1,8. Skor tersebut dinilai baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

f. Perputaran Persediaan

Penentuan skor rasio perputaran persediaan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dihitung sebagai berikut :

Tabel 4.9. : Penentuan skor perputaran persediaan

Perputaran Persediaan% (PP)	Skor
PP > 60	0
55 < PP ≤ 60	0,5
45 < PP ≤ 55	1
35 < PP ≤ 45	1,5
30 < PP ≤ 35	2
25 < PP ≤ 30	1,5
15 < PP ≤ 25	1
5 < PP ≤ 15	0,5
0 < PP ≤ 1	0,4

$$\begin{aligned}
 \text{Perputaran persediaan} &= \frac{\text{Total Persediaan} \times 365}{\text{Pendapatan BLUD}} \times 1 \text{ hari} \\
 &= \frac{\text{Rp.5.461.480.481} \times 360}{\text{Rp.67.527.517.901}} \times 1 \text{ hari} \\
 &= 29,12\%
 \end{aligned}$$

RSUD Sawerigading Palopo mempunyai rasio perputaran pesediaan sebesar 29,12%, maka skor rasio perputaran persediaan sebesar 1,5. Skor tersebut dinilai baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

g. Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional

Penentuan skor rasio PNBPN terhadap biaya operasional berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dihitung sebagai berikut :

Tabel 4.10. : Penentuan skor rasio PNBPN terhadap biaya operasional

Rasio PNBPN terhadap biaya operasional % (PB)	Skor
PB > 65	2,5
57 < PB ≤ 65	2,25
50 < PB ≤ 57	2
42 < PB ≤ 50	1,75
35 < PB ≤ 42	1,5
28 < PB ≤ 35	1,25
20 < PB ≤ 28	1
12 < PB ≤ 20	0,75
4 < PB ≤ 12	0,5
0 < PB ≤ 4	0

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio PNBPN terhadap biaya operasional} &= \frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.79.865.437.532}}{\text{Rp.124.075.370.698}} \times 100\% \\
 &= 64,37\%
 \end{aligned}$$

RSUD Sawerigading Palopo mempunyai rasio PNBPN terhadap biaya operasional sebesar 64,37, maka skor rasio PNBPN terhadap biaya operasional sebesar 2,25. Skor tersebut dinilai baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

h. Rasio Biaya Subsidi

Penentuan skor rasio biaya subsidi berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dihitung sebagai berikut :

Tabel 4.11. : Penentuan skor rasio biaya subsidi

Rasio Biaya Subsidi % (SBP)	Skor
SBP > 1	0
1 < SBP ≤ 3	0,5
3 < SBP ≤ 5	1
5 < SBP ≤ 10	1,5
10 < SBP ≤ 15	2
15 < SBP ≤ 18	1,5
18 < SBP ≤ 20	1
SBP ≤ 20	0,5

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio biaya subsidi} &= \frac{\text{Jumlah Subsidi Biaya Pasien}}{\text{Pendapatan BLUD}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.27.624.303.908}}{\text{Rp.67.527.517.901}} \times 100\% \\
 &= 40,91\%
 \end{aligned}$$

RSUD Sawerigading Palopo mempunyai rasio biaya subsidi sebesar 40,91%, maka skor rasio biaya subsidi sebesar 0,5. Skor tersebut dinilai baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian dan Rasio Keuangan

Sebagai unit pelayanan publik yang menetapkan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD penuh sesuai Sesuai Surat Keputusan Walikota Palopo tanggal 9 April 2012 nomor 397/IV/2012 tentang penetapan RSUD Sawerigading Palopo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLUD penuh, meskipun penerapan pelaksanaannya baru dimulai sejak 1 Januari 2013 dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

Dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan, Pemerintah melalui Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 telah

mengatur keputusan untuk menjalankan dan mengikuti peraturan tersebut dengan penuh tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018. Kegagalan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo akan mengakibatkan lemahnya pengelolaan keuangan dan pelaporan pemerintah yang tidak berfungsi. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan RSUD Sawerigading Palopo akan berdampak serius pada kualitas pekerjaan di dalam dan di luar Rumah Sakit.

Status BLUD rumah sakit telah diperoleh tanpa didahului oleh kesiapan semua pihak rumah sakit dalam melakukan berbagai perubahan sesuai dengan tujuan pemerintah menjadikan rumah sakit sebagai BLUD, sehingga perubahan dan penyesuaian yang perlu dilakukan berjalan lambat dan bertahap. Perbaikan atas sistem pengumpulan data pengelolaan keuangan perlu dilakukan. Peningkatan nilai kinerja keuangan tidak dapat berjalan dengan sendirinya, karena sangat terkait dengan aspek-aspek lainnya seperti adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan tata kelola yang berjalan baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan, pengelolaan sumber daya yang baik dan tertib serta keandalan sumber data kinerja.

Dalam hal ini pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp.66.576.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.67.527.517.901,27 atau 101,43%. Belanja barang dan jasa pada RSUD Sawerigading Palopo mempunyai anggaran sebesar Rp.33.396.158.874,13 atau 93,34%. Adapun belanja modal RSUD Sawerigading Palopo sebesar

Rp.27.157.334.073,00 atau 97,53%. Peningkatan pada aset dapat dilihat dari pos-pos, dimana aset lancar mempunyai total sebesar Rp.37.487.183.360,00. Adapun persediaan bahan habis pakai mempunyai total sebesar Rp.5.461.480.481,00, Kewajiban RSUD Sawerigading Palopo mempunyai total sebesar Rp.29.163.777.051,00 dari hutang usaha dan hutang jangka pendek lainnya. Adapun ekuitas dana investasi sebesar Rp.208.441.003.428,00 yang di dapat dari investasi aset tetap dan investasi aset lainnya.

Hasil dari analisis rasio keuangan RSUD Sawerigading Palopo dapat dilihat dari laporan keuangan. Rasio kas sebesar 15,09% itu berarti skor rasio kas BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 0,25. Rasio lancar sebesar 128,54% itu berarti rasio lancar BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 0,5. Periode penagihan piutang sebesar 147,27% itu berarti skor BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 0. Perputaran aset tetap sebesar 75,54% itu berarti skor dari BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 2. Imbalan atas aset tetap sebesar 10,44% itu berarti skor dari BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 2. Imbalan ekuitas sebesar 7,84% itu berarti skor dari BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 1,8. Perputaran persediaan sebesar 29,12% itu berarti skor dari BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 1,5. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional sebesar 64,37% itu berarti skor BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 2,25. Rasio Subsidi Biaya Pasien sebesar 40,91% itu berarti skor dari BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 0,5. Seluruh nilai dan skor rasio yang ada pada Rumah Sakit dinilai Baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Alhamdulillahirobbil 'Alamin. Penelitian ini sampai pada akhir perjalanannya sesuai dengan judul penelitian ini adalah Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Saki Umum Daerah Sawerigading Palopo. Melalui metode kualitatif peneliti telah menggali, memahami, dan menjelaskan pengetahuan lebih dalam mengenai Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Saki Umum Daerah Sawerigading Palopo. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan, adapun yang penulis dapatkan adalah :

Bentuk penerapan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum RSUD Sawerigading Palopo yaitu berupa peningkatan pelayanan terhadap masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan meningkatkan kinerja keuangan. Adapun hasil dari analisis rasio keuangan RSUD Sawerigading Palopo yang berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dapat dilihat dari laporan keuangan. Hasil dari analisis rasio keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan. Rasio kas sebesar 15,09% itu berarti skor rasio kas sebesar 0,25. Rasio lancar sebesar 128,54% itu berarti rasio lancar sebesar 0,5. Periode penagihan piutang sebesar 147,27% itu berarti skor sebesar 0. Perputaran aset tetap sebesar 75,54% itu berarti skor dari sebesar 2. Imbalan atas aset tetap sebesar 10,44% itu berarti

skor dari sebesar 2. Imbalan ekuitas sebesar 7,84% itu berarti skor dari sebesar 1,8. Perputaran persediaan sebesar 29,12% itu berarti skor dari sebesar 1,5. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional sebesar 64,37% itu berarti skor sebesar 2,25. Rasio Subsidi Biaya Pasien sebesar 40,91% itu berarti skor dari sebesar 0,5. Seluruh nilai dan skor rasio yang ada pada Rumah Sakit dinilai Baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

5.2. Saran

Perlu adanya kecepatan dan ketepatan waktu dalam proses pelaporan pada pengumpulan dokumen agar ketika RSUD Sawerigading menerima barang yang masuk, dokumen dan barang yang tersedia serta yang telah terpakai diketahui dan tervalidasi bahwa adanya fisik (barang yang masuk) dengan dokumen. Sehingga tidak terjadinya kesulitan dalam penyandingan barang. Penambahan sumber daya manusia juga perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdan Rojabi. *Teknik Wawancara (Research Methodology)*. Okt 22. 2019.
- Armereo, C., Marzuki, A., dan Seto, A. A. (2020). *Manajemen Keuangan* (N. L. Inspirasi (ed.); Pertama). Nusa Litera Inspirasi
- Asmara Hadi. 2019. *Evaluasi Implementasi Badan Layanan Umum di RSUD M YUNUS Bengkulu Tahun 2014*. Universitas Bengkulu Indonesia
- Astuty, H. S. (2019). *Praktik Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula*. Deepublish.
- Bambang Azis Silahahi, dkk. 2022. *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai*. Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara. Indonesia
- Djuhaeni. Henni. 2006. *Sistem Penganggaran Rumah Sakit*. Unpad. Bandung
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Handayani, Fitri (2021) *Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Layz Cake and Bakery*. Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Haryati, Nuning Tri (2017) *Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah prof. dr. margono soekarjo purwokerto*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Kementerian Keuangan. 2015. *Siklus Anggaran*. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Mia Khairina. 2017. *Analisis Implementasi Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Nanang Nopriandy P. 2017. *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., Sari, A. P., Hasyim, H., Yanti, Y., dan Butarbutar, M. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis.
- Ratna Suryaningsih. 2018. *Kinerja Keuangan Layanan Kesehatan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU*. Vol.15, No.1
- Reni Riawati, Firman Pribadi. 2018. *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul*. Master of Hospital Management Muhammadiyah University of Yogyakarta.
- Riani Isye Kawenas, Lintje Kalangi, Linda Lambey. 2019. *Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUD Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*. Program Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, C., Farihah, E., dan Hartadinata, O. S. (2020). *Anggaran Perusahaan: Teori Dan Praktika*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Syahril. 2017. *Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep*. Vol3 No 1 (2013): Performance : Jurnal Bisnis & Akuntansi
- Trie Nadilla. Hasan Basri. Heru Fahlevi. 2017. *Identifikasi Permasalahan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)-Studi Kasus Pada Rumah Sakit Permata dan Rumah Sakit Berlian*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- U. Vina Dwirista. 2017. *Analisis Penerapan Pola Penelolan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas*. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi
- Uce Binsar Sahat Maruli Sitinjak. 2017. *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Karimun*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Yeni Priatna Sari, Hetika. dan Nurul Mahmudah. 2021. *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Akrual Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardinah Kota Tegal*. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 2017* ISSN.: 2528 -6145